

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR
MINYAK MELALUI PERTAMINI DI WONOCOLO

SKRIPSI

OLEH

ERLIN FATMAWATI

NIM. C92215100



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlin Fatmawati

NIM : C92215100

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di
Indonesia Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak
Melalui Pertamina di Wonocolo

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 02 Juli 2019
Saya yang menyatakan,



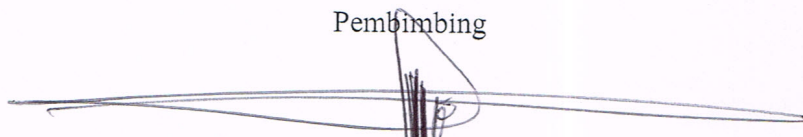
Erlin Fatmawati
NIM. C92215100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Erlin Fatmawati NIM. C92215100 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Mei 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a vertical line crossing it in the middle, and a small loop at the end of the horizontal stroke.

Dr. Sanuri, M.Fil.I.

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Erlin Fatmawati NIM. C92215100 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Selasa, 25 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



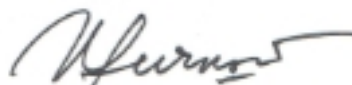
Dr. Santuri, M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji II,



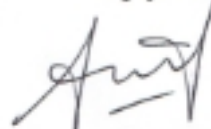
H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



Wahid Hadi Purnomo, MH.
NIP. 197410252006041002

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHL., MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 02 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Erlin Fatmawati
NIM : C92215100
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : erlinfatmawatii@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP
JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK MELALUI PERTAMINI DI WONOCOLO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2019

Penulis

Erlin Fatmawati

Bab kedua, membahas mengenai jual beli BBM dalam Hukum Islam dan Hukum positif. Pada bab ini berisi informasi tentang pengertian Distribusi, Kaitan distribusi dengan jual beli, dasar hukum jual beli, rukun syarat jual beli, macam jual beli, jual beli yang dibolehkan atau dilarang. Serta peraturan hukum di Indonesia tentang Bahan Bakar Minyak yang tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015.

Bab ketiga yaitu praktik distribusi BBM melalui Pertamina di Surabaya. Penyajian data yang memuat tentang gambaran umum tentang profil Pertamina, alat-alat yang digunakan dalam Pertamina, serta prosedur distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu berisi tentang analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Jual Beli BBM melalui Pertamina di Surabaya.

Bab kelima yaitu penutup, merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran terdiri dari masukan dari penulis terkait dengan penelitian mengenai distribusi BBM melalui Pertamina di Surabaya.

dengan seizin wali jika pelaku akad adalah anak dibawah umur, orang gila, atau idiot. Namun, pada beberapa kaidah mengecualikan anak kecil sebagai pelaku akad jika barang yang dibelinya bernilai rendah, seperti membeli permen atau snack.

- c. Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, apabila tidak mendapatkan izin dari pemilik barang maka jual beli barang yang belum dimiliki hukumnya tidak sah.
- d. Obyek transaksi yang diperbolehkan agama. Oleh karena itu, tidak diperkenankan untuk memperjual belikan barang haram, seperti: khamr, film porno, daging babi, dan lainnya.
- e. Obyek transaksi merupakan barang yang dapat diserahkan. Tidak sah jika menjual sebuah mobil yang telah hilang, ikan yang berada di laut, dan sebagainya karena tidak dapat diserahkan.
- f. Obyek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak ketika akad berlangsung. Tidak sah jika menjual suatu barang yang tidak jelas. Misalnya, dari pihak penjual mengatakan, “aku jual motor kepadamu” dan pembeli mengatakan, “aku terima”, sedangkan pembeli belum melihat dan mengetahui kondisi motor tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Tidak sah jika suatu jual-beli dilakukan apabila penjual mengatakan, “saya jual motor ini kepadamu dengan harga yang nantinya akan kita sepakati”. Hal

3) Jual beli yang mengandung unsur *Gharar* (manipulasi)

Jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelas wujud barangnya., yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya.

4) Jual beli najis dan barang bernajis

Terdapat beberapa pendapat terkait jual beli najis ini. Hanafi dan Zhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits (minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala). Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Namun, Syafi'i, Hanbali, dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang tersebut.

5) Jual beli dengan uang muka

Yang dimaksud dengan jual beli '*urbu*' adalah seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harta. Namun, apabila tidak

- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual bus ini kepada kamu bulan depan setelah mendapatkan gaji:, menurut Jumhur ulamayang seperti itu batal. Namun menurut ulama *Hanañiyah* jual beli tersebut sah sampai waktu yang disyaratkan dan ditentukan telah selesai.
- c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat ditunjukkan ketika jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama *Hanañiyah* menyatakan bahwa jual beli yang seperti ini tidak sah jika pembeli memiliki hak *khiyaḥ*(memiliki), yaitu *khiyaḥ-ru'yah*.
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Menurut jumhur ulama jual beli tersebut sah apabila orang buta itu memeiliki hak *khiyaḥ*.
- e. Barter dengan barang yang diharamkan, seperti menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, *khamr*, darah, dan bangkai.
- f. Jual beli *ajal*, seperti ketika seseorang menjual barangnya seharga Rp 200.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik pertamamembeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp 175.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp 25.000,-. Jual beli tersebut termasuk fañid karena menyerupai dan mendekati riba.

khusus penugasan, daerah yang belum terdapat penyalur, penyalur, dan berbagai istilah lainnya.

Isi dari Bab 2 mengenai penyaluran jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. Terdiri dari 2 pasal yang diantaranya menyebutkan tujuan disusunnya peraturan ini yaitu untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI. Pendistribusian tersebut akan dilakukan langsung oleh Badan Usaha kepada konsumen maupun melalui penyalur yang telah ditunjuk, apabila di suatu daerah belum terdapat penyalur maka dapat ditunjuk sub penyalur.

Bab 3 merupakan pembahasan mengenai penunjukan sub penyalur yang terdiri dari 7 pasal. Dalam bab ini, menjelaskan secara detail penunjukan sub penyalur yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yang di daerahnya belum terdapat penyalur. Dalam bab ini juga menjabarkan mengenai syarat menjadi sub penyalur, penempat sub penyalur oleh pemerintah daerah setempat, dan penetapan harga BBM pada sub penyalur.

Pada Bab 4 berisi mengenai alokasi BBM pada Sub penyalur, dimana untuk alokasi volume BBM untuk penyalur disesuaikan dengan kebutuhan riil konsumen dan volume BBM yang disalurkan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang merupakan bagian dari kuota yang ditetapkan oleh Badan Usaha.

memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan tersebut. Untuk menjadi Sub Penyalur syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjadi sub penyalur haruslah masyarakat yang memiliki usaha dagang ataupun unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
2. Lokasi yang akan digunakan harus sesuai dengan standar keselamatan kerja dan lingkungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki penyimpanan BBM dengan kapasitas maksimal 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Alat angkut BBM yang digunakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Alat penyaluran yang dimiliki harus memenuhi syarat teknis dan keselamatan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Telah memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk membangun fasilitas Sub Penyalur.
7. Lokasi yang digunakan harus memiliki jarak minimal 5km dari lokasi penyalur berupa agen penyalur minyak solar (APMS) terdekat atau 10km dari penyalur berupa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan

untuk dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. BBM jenis Pertalite dan Pertamax merupakan olahan dari minyak mentah yang berada di dalam perut bumi. Minyak mentah beserta hasil olahannya tidak termasuk dalam barang yang najis sehingga boleh untuk diperjual belikan.

Adanya Pertamina menjadi sarana berlangsungnya transaksi jual beli dimana kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lain, dimana pembeli membutuhkan BBM agar kendaraannya tetap bisa berjalan dan penjual membutuhkan pembeli agar mendapatkan keuntungan. Pihak pembeli menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli ini. Dalam transaksi ini, obyek yang digunakan adalah BBM jenis pertalite dan pertamax dimana obyek tersebut dapat diserahterimakan.

Dalam praktiknya, transaksi jual beli BBM melalui kios Pertamina yang berada di Kecamatan Wonocolo dapat digolongkan dalam jual beli yang *sahih*, hal tersebut dikarenakan jual beli BBM melalui Pertamina telah memenuhi syarat yang ditentukan. Selain itu barang yang dijual merupakan milik penjual serta tidak tergantung pada hak *khiyar*.

Dengan adanya pertukaran hak kepemilikan yaitu BBM yang dibeli dengan alat pembayaran berupa uang, maka hukum dari jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung yang mengakibatkan

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam hal ini pihak yang membuat perjanjian harus menyetujui mengenai hal yang diperjanjikan tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Pada praktik jual beli BBM melalui Pertamina ini kesepakatan terjadi secara tidak langsung, dimana penjual telah menetapkan harga BBM perliternya dan pembeli telah mengetahui harga tersebut dan menyetujuinya.
- b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan. Dalam melakukan sebuah perjanjian, para pihak haruslah orang yang cakap menurut hukum, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1330 KUH Perdata yang mana orang-orang yang tidak cakap hukum diantaranya orang yang belum dewasa dan orang yang berada dalam pengampuan. Dalam praktik perjanjian jual beli BBM di Pertamina pembeli rata-rata adalah usia 18 tahun keatas dan tidak dalam pengampuan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu. Dalam sebuah perjanjian, objek yang diperjanjikan harus jelas. Dalam jual beli ini BBM jenis bensin pertalite dan pertamax sebagai objek transaksinya. Pembeli membeli bensin dengan jenis tertentu beserta harganya, lalu melakukan pembayaran dan penjual akan mengisi tangki kendaraan bermotor sesuai jenis BBM yang diminta oleh pembeli tersebut.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab dinyatakan terlarang apabila sebab tersebut dilarang oleh undang-undang, ataupun jika sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. BBM

atas segala kegiatan hilir yang dilakukan oleh penyalur maupun sub penyalur dalam lingkup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan ataupun niaga termasuk segala kegiatan yang dilakukan oleh Pertamina.

Dalam menjalankan kegiatan usaha hilir berupa perniagaan, Pertamina harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Hal tersebut berdasarkan pada pasal (23) ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bahwa “Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah.”

Untuk perizinan dalam penyaluran BBM dapat dilakukan oleh Badan Usaha untuk pengguna skala kecil dengan melalui penyalur diatur dalam pasal (48) ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi bahwa “badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (*wholesale*) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.”

Apabila terdapat pihak yang melakukan kegiatan usaha hilir berupa niaga sedangkan tidak memiliki izin sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sesuai pasal 53 huruf c menegaskan bahwa kegiatan niaga tersebut akan dikenakan pidana penjara apling lama 3 tahun dengan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00.

